

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian teori

2.1.1 Pengertian Kredit

Menurut (Sinungan :1992) Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan. Kredit sendiri dalam arti luas adalah pinjaman yang didasarkan kepercayaan, artinya kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman serta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Kegiatan prekreditasi bisa dilakukan oleh perorangan, anggota kelompok atau badan usaha semua kegiatan prekreditasi dilandasi dasar kepercayaan.

Kegiatan umum perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana, seperti dalam bentuk kredit kepada masyarakat khususnya yang membutuhkan dana untuk investasi, modal kerja dan konsumsi, penyaluran dana dalam bentuk kredit agar bank dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin serta dengan adanya kredit dapat membantu usaha kecil dan menengah dalam usahanya lebih maju.

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, pengertian kredit diatur dalam pasal 1 butir 11 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan.

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian kredit agar lebih jelas berikut ini definisi menurut para ahli:

1. Menurut Hasibuan (2011), kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
2. Menurut Rivai (2004:4), kredit adalah penyerahan barang,jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.
3. Menurut Sastradipoera (2004:151), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu.
4. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/3/PBI/2005 tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.1.2 Unsur-unsur kredit

Unsur- unsur yang terdapat dalam kredit (Aspek-aspek hukum masalah perkreditan), adalah :

a. Kepercayaan

yaitu adanya keyakinan dari pihak bank kepada nasabah debitur bahwa akan melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

b. Kesepakatan

yaitu suatu perjanjian antara kedua belah pihak antara bank dan nasabah bahwa telah menyetujui hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberi kredit dan pelunasannya, jangka waktu tersebut sebelumnya sudah di setujui dan di sepakati oleh pihak bank dan nasabah debitur.

d. Risiko

yaitu untuk menghindari risiko buruk dalam perjanjian kredit, maka sebelumnya telah dilakukan perjanjian atau jaminan yang dibebankan kepada nasabah debitur.

e. Prestasi

yaitu adanya objek yang berupa bunga atau imbalan yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah debitur.

2.1.3 Jenis-jenis kredit

Menurut (Muljono :1989) Secara umum jenis-jenis kredit diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jangka waktu

Jenis pemberian kredit berdasarkan jangka waktu masih dibedakan menjadi beberapa:

a. Kredit jangka pendek

Adalah kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun, biasanya kredit berbentuk seperti kredit wesel, kredit penjualan dan kredit modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Adalah kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun, bentuknya seperti kredit pembelian sepeda motor.

c. Kredit jangka panjang

Adalah kredit yang memiliki waktu lebih dari tiga tahun , umumnya kredit ini berupa investasi dengan tujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

2. Kredit berdasarkan kegunaan

Untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambaha.

a. Kredit investasi

Adalah kredit yang digunakan untuk investasi produktif , tetapi baru menghasilkan jangka waktu yang relatif lama, seperti: tanah, mesin dan sebagainya.

b. Kredit modal kerja

Adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi operasionalnya, seperti: membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya – biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi.

3. Kredit berdasarkan tujuan

Adalah kredit ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untu usaha kembali atau untuk keperluan pribadi .

a. Kredit produktif

Adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi , kredit ini diberikan untuk menghasilkan barangatau jasa.

b. Kredit konsumtif

Adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi, kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena digunakan oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang yang pembayarannya dari hasil penjualan barang tersebut.

4. Kredit berdasarkan jaminannya

a. Kredit tanpa jaminan

Adalah pemberian kredit tanpa jaminan materiil , pemberian ini sangat selektif yang ditunjukkan kepada nasabah yang berdasarkan kejujuran, ketaatannya baik dalam transaksi perbankan maupun usaha yang dijalani.

b. Kredit jaminan

Adalah kredit untuk debitur yang berdasarkan dari keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya jaminan baik dalam bentuk barang.

5. Kredit berdasarkan sektor usaha:

- a. Kredit pertanian: untuk pembiayaan perkebunan.
- b. Kredit peternakan : untuk pembiayaan peternakan
- c. Kredit industri: untuk membiayai industri kecil , menengah dan besar.
- d. Kredit pertambangan : untuk pembiayaan pertambangan.
- e. Kredit pendidikan: untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.
- f. Kredit profesi: diberikan kepada para professional seperti: dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan: untuk pembiayaan pembelian atau pembangunan rumah.

2.1.4 Prinsip- prinsip kredit

Menurut (Kasmir : 2008) Peluncuran kredit oleh suatu bank dilakukan dengan berpegangan pada beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:

2.1.4.1 prinsip 6C:

1. *Character*: yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-

kewajibannya calon debitur. *Character* merupakan faktor yang dominan sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya tetapi kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari. Untuk menilai karakter ini memang cukup sulit, karena masing-masing manusia mempunyai watak yang berbeda satu sama lainnya, oleh karena itu para pengelola kredit harus mempunyai ketrampilan psikologi untuk dapat mengenali watak dari para calon debiturnya.

2. *Capacity*: yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang dibiayai dengan kredit dari bank, jadi *capacity* untuk menilai sampai di mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasi tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
3. *Capital*: yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur, hal ini kelihatannya kontradiktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana.
4. *Collateral*: yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau ada sebab lain seperti dimana debitur tidak dapat melunasi kreditnya karena hasil usahanya yang normal, jaminan juga dapat sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada waktu yang akan datang pada saat kredit tersebut harus dilunasi.
5. *Condition of economy*: yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain- lain yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian pada saat tertentu atau dalam kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha yang memperoleh kredit.

6. *Constraint*: yaitu penilaian debitur yang dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang untuk usaha di suatu tempat.

2.1.4.2 Prinsip 4P

Menurut (Kasmir : 2008) Dalam suatu pemberian kredit oleh bank selain prinsip 6C juga terdapat juga prinsip 4P:

1. *Personality*: adalah penilaian bank mengenai kepribadian peminjam, misalnya riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga.
2. *Purpose*: adalah bank menilai peminjam mencari dana mengenai tujuan atau keperluan dalam penggunaan kredit .
3. *Payment*: adalah untuk mengetahui kemampuan dari debitur mengenai pengembalian pinjaman yang diperoleh dari prospek kelancaran penjualan dan pendapatan , sehingga di perkirakan kemampuan pengembalian pinjaman dapat ditinjau waktu jumlahnya.
4. *Prospect*: adalah harapan usaha dimasa yang akan datang serta bank harus melakukan analisis dengan cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang dilakukan oleh pemohon kredit.

2.1.5 Jaminan Kredit

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

- 1). Dengan Jaminan
 - a. Jaminan benda yaitu barang- barang yang dapat dijadikan jaminan seperti :Tanah, kebun, sawah, bangunan, rumah, pabrik, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau peralatan.
 - b. Jaminan *surat –surat berharga* yaitu benda – benda yang merupakan surat-surat yang dapat dijadikan sebagai jaminan seperti : sertifikat rumah, sertifikat tanah, sertifikat sawah, bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan lain-lainnya.

- c. Jaminan Orang yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resikonya.

2). Tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan yaitu, kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan kepada perusahaan yang memang benar-benar benefit dan professional, sehingga kemungkinan kredit macet tersebut sangat kecil.

2.1.6 Usaha Micro, Kecil , dan Menengah (UMKM)

2.1.6.1 Pengertian UMKM

UMKM merupakan sektor perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan yang cukup populer dikalangan masyarakat Indonesia. Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi UMKM yang disampaikan berbeda- beda antara satu dengan yang lainnya diantaranya (Bank Indonesia, 2011):

1. Badan Pusat Statistik (BPS)

BPS memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha mikro merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja yang kurang dari 5 orang, untuk usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 12/PMK.06/2005 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil.

Kriteria usaha mikro dalam peraturan menteri tersebut adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus

juta rupiah) per tahun. Sedangkan usaha kecil adalah usaha produktif milik warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi , baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar, selain itu juga memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per tahun.

3. Undang – Undang No. 20 Tahun 2008.

Pada tanggal 4 juli 2008 telah ditetapkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro , Kecil, dan Menengah. Menurut UU ini, yang disebut usaha mikro adalah entitas dengan kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Selajutnya yang disebut dengan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000, 00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pengertian UMKM dari berbagai literatur memiliki beberapa persamaan sehingga dari definisi- definisi tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa UMKM adalah sebuah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak, memiliki tenaga kerja 1 sampai 99 orang, milik Warga Negara Indonesia dengan kekayaan bersih paling banyak Rp.10.000.000.000,00 atau memiliki total penjualan maksimal Rp.50.000.000.000,00 per tahun.

2.1.6.2 Keunggulan UMKM(Partomo dan Rachman,2001) antara lain:

1. Inovasi besar dalam tehnologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
3. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis
4. Terdapat dinamisme mangerial dan peranan kewirausahaan

2.1.6.3 Kelemahan UMKM dalam Mengakses Kredit Perbankan

Kelemahan UMKM hampir menyangkut semua aspek yang menjadikriteria kelayakan kredit komersial yaitu *Character*, *Capital*, *Colateral Capacity of repayment* dan *Condition of economic* (Prinsip 5C). Kelemahan-kelemahan tersebut dijelaskan sebagaimana berikut (Subandi, 2008):

1. Jika ditinjau berdasarkan aspek karakter (*character*), maka kelemahan UMKM ditandai dengan:
 - a) Belum baiknya sistem administrasi usaha terutama sistem administrasi keuangan
 - b) Rendahnya kualitas SDM terutama dilihat dari kemampuan manajemen modern
 - c) Ketidakpastian ketersediaan bahan baku utama dan bahan tambahan (penolong)
 - d) Peralatan dan teknologi produksi yang digunakan sangat sederhana sampai dengan setengah modern, sehingga produktifitasnya relatif rendah
2. Jika ditinjau berdasarkan aspek pemilikan modal (*capital*), maka kelemahan sebagian besar UMKM ditandai dengan:
 - a) Kecilnya rata-rata pemilikan asset
 - b) Terbatasnya rata-rata pemilikan modal UMKM
 - c) Perkembangan dari kedua aspek tersebut sangat rendah, karena rendahnya *saving* akibat kecilnya laba bersih yang diperoleh.
3. Jika ditinjau berdasarkan aspek pemilikan agunan (*collateral*), maka kelemahan yang nyata terlihat adalah rendahnya kemampuan UMKM untuk memberikan agunan, baik dikarenakan

terbatasnya pemilikan aset berharga dan atau kurangnya legalitas aset yang dimiliki oleh UMKM.

4. Jika ditinjau berdasarkan aspek kemampuan membayar (*capacity Of repayment*), beberapa fenomena yang terlihat adalah berkaitan dengan ketiga aspek diatas, yaitu UMKM pada umumnya merupakan perusahaan keluarga yang cenderung belum memisahkan administrasi keuangan keluarga dengan keuangan perusahaan. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi perbankan untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa besar kemampuan membayar dari UMKM.
5. Jika ditinjau berdasarkan kondisi perekonomian (*condition of economics*), kondisi perekonomian nasional selama decade tahun 2000-an ini diindikasikan dari ketidakpastian akibat perubahan-perubahan perekonomian dunia yang ada kalanya bersifat ekstrem. Dalam kondisi yang demikian, kalangan perbankan cenderung meningkatkan kehati-hatianya dalam menyalurkan kredit yang berakibat pada semakin kecilnya peluang pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan yang dinilai berisiko tinggi, atau mudah dipengaruhi oleh perubahan perekonomian dunia.

2.1.7 Lama Usaha

Lama usaha merupakan lamanya pedagang berkarya, pada usaha perdagangan yang sedang dijalani saat ini (Asmie,2008). Lamanya suatu usaha dapat menimbulkan pengalaman berusaha, dimana pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah laku (sukirno, 1994). Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lama seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi produktivitasnya (kemampuan profesionalnya/ keahliannya), sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil

dari pada hasil penjualan, semakin lama menekuni bidang usaha perdagangan akan makin meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku konsumen (Wicaksono, 2011).

Semakin lama usaha tersebut berjalan maka akan mengakibatkan adanya perkembangan usaha yang signifikan kearah positif. Perkembangan dari usaha tersebut tergantung dari iklim perdagangan dan persaingan yang terjadi di dunia usaha atau pasar, Biasanya usaha yang lebih lama berdiri cenderung lebih berkembang karena sudah memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan usahanya dan bisa dibilang karena lebih dapat bersaing dalam dunia usaha tersebut.

Perusahaan yang lebih lama berdiri juga memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengumpulkan laba ditahan serta mengurangi kebutuhan pinjaman jika dana internal sudah mencukupi (Bell dan Vos, 2009). Sebaiknya perusahaan baru berusaha meningkatkan jumlah keuangan mereka untuk memberikan kredit perusahaan baru namun akan dikenakan biaya (bunga) secara proporsional lebih besar dari perusahaan karena dianggap memiliki margin keuntungan yang lebih rendah dan berisiko tinggi (Treichel dan Scoot 2006).

2.1.8 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum. Dengan demikian, tingkat pendidikan seseorang dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki kinerja perusahaan (Hariandja, 2002). Pemilik usaha yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung mampu mengurangi *asimetric information* dan tampak lebih layak kredit. Hal ini menyebabkan penurunan biaya *adverse selection* (Bell dan Vous ,

2009). Oleh karena itu pemilik usaha yang mempunyai pendidikan lebih tinggi mempunyai pengetahuan untuk mengakses kredit dari perbankan.

Dalam GBNH ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan pribadi, kemampuan seseorang baik didalam maupun diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Sesuai dengan pendapat Phil. Coombs , pendidikan dibedakan menjadi 3 betuk yaitu : a. pendidikan formal, b. pendidikan informal, c. pendidikan non formal. (Vembrianto, St, 1997 :35)

2.1.8.1 Bentuk – Bentuk Pendidikan

a. pendidikan formal

pendidikan formal yaitu : pendidikan yang diselenggarakan disekolah secara teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat (Vebriarto, St, 1978:20). Sekolah merupakan lembaga utama yang bertugas untuk mengembangkan dan membentuk pribadi siswa, interaksi sosial, inovasi, dan pra seleksi dan pra alokasi tenaga kerja (Vebriarto, St, 1978: 53).

Jadi sekolah bertugas menyiapkan anak didiknya sebagai calon pekerja dalam masyarakat dan sebagai calon warga negara dan sebagai manusia yang berkepribadian baik.

b. Pendidikan informal

pendidikan informal yaitu: pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah oleh badan pemerintah atau swasta secara teratur dalam waktu yang realtif singkat yang lebih menekankan kepada kecakapan dan ketrampilan tertentu, tetapi tidak mengikuti peraturan yang ketat dan tetap pendidikan formal. Dengan kata lain pendidikan informal adalah pendidikan diluar sekolah yang bersifat kursus-kursus yang lebih menekankan kepada pengetahuan ketrampilan. Bentuk pendidikan

informal bersifat sangat fleksibel dan lebih efektif untuk mengembangkan anak pada bidang kecakapan tertentu dalam waktu yang tidak lama.

c. Pendidikan non formal

Menurut Prof. Dr. Hans Dieter Ever pendidikan sub sistem pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan oleh orang tua atau orang lain kepada anak baik dalam keluarga maupun lingkungan hidupnya tanpa mengeluarkan biaya pendidikan. Pengetahuan ketrampilan yang diketahui untuk mencari nafkah (Evers, H.D, bahan seminar, 1979) jenis pendidikan ini nonformal yang diajarkan kepada anak seperti : memasak, menjahit pakaian, memperbaiki rumah, dan lain-lain.

2.1.8.2 Pentingnya Pendidikan dikalangan UMKM

Pendidikan akan membantu terciptanya pendidikan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai hal ini mencerminkan efisien kerja yang baik dikalangan UMKM. Pendidikan formal mulai dari SD sampai perguruan tinggi membekali seseorang dengan dasar pengetahuan dan logika, pengembangan watak dan kepribadian. Pendidikan formal yang cukup tinggi belum merupakan fondasi yang kuat didalam mewujudkan entrepreneurship. Pendidikan dikalangan UMKM masih merupakan dasar yang belum kuat untuk melaksanakan entrepreneurship yang sesungguhnya. Pendidikan merupakan pembuka jalan kearah penggunaan teknologi baru dan terbentuknya entrepreneurship masih di perlukan persyaratan yang berupa persediaan fasilitas permodalan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin cepat pula besarnya jumlah penghasilan yang diharapkannya dan lebih besar pula biaya pribadi yang dikeluarkannya. Maka untuk memaksimalkan selisih antara penghasilan yang diharapkan dengan pengeluaran biaya yang

diperkirakan, maka perlu diusahakan perlu menyelesaikan pendidikan yang setinggi mungkin. Semakin meningkat pendidikan semakin cepat terjadinya proses pembangunan untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2.1.9 Pendapatan

2.1.9.1 Pengertian Pendapatan

Mengukur kondisi ekonomi seseorang, salah satu konsep yang sering digunakan adalah tingkat pendapatan. Pendapatan dapat menunjukkan seluruh uang yang diterima atau diperoleh oleh seseorang selama jangka waktu tertentu pada setiap kegiatan ekonomi. Pendapatan merupakan uang yang diterima seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, bunga, laba, tunjangan, uang pensiun, dan lain sebagainya (Collin, 1994: 287). Menurut kamus ekonomi, pendapatan adalah berhubungan dengan pendapatan pemerintah dari pajak, bea impor, dan sebagainya. Istilah ini juga diterapkan terhadap pendapatan perusahaan dan pendapatan individu.

2.1.9.2 Unsur- Unsur Pendapatan

Didalam unsur- unsur pendapatan yang dimaksud adalah asal dari pada pendapatan yang diperoleh, dimana unsur- unsur tersebut meliputi:

- a. Pendapatan hasil produksi barang dan jasa
- b. Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva atau sumber- sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain.
- c. Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur- unsur pendapatan lain- lain suatu perusahaan.

2.1.9.3 Sumber- Sumber Pendapatan

Dalam pendapatan diketahui bahwa sumber pendapatan itu dapat melalui beberapa aspek dimana dapat dijabarkan menjadi dua sumber pendapatan, yaitu:

- a. Pendapatan operasional yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan.
- b. Pendapatan non operasional yaitu pendapatan yang tidak terkait dengan aktifitas perusahaan yaitu pendapatan yang didapat dari faktor eksternal.

2.1.9.4 Sebab- Sebab ketimpangan pendapatan

a. usia

pendapatan meningkat seiring bertambahnya usia dan masa kerja seseorang, penambahan usia akan diiringi dengan penurunan pendapatan. Titik puncak diperkirakan pada usia 45- 50 tahun, dengan asumsi produktivitas nasional dianggap sebagai unsure konstan, alasan karena pekerja muda biasanya masih terbatas dalam ketrampilan dan pengalamannya. Produk dari mereka lebih rendah dari pada rata-rata produk yang dihasilkan oleh pekerja yang lebih berumur dan berpegalaman, serta lamanya kerja dalam satu hari, seminggu dan selanjutnya, yang ditekuni seseorang biasanya mulai berkurang ketika umur 45-50 karena daya tahan dan kesehatan mulai pudar dan produktivitasnya turun serta pendapatan juga berkurang.

b. Keberanian mengambil resiko

Bekerja dilingkungan kerja yang berbahaya biasa memperoleh pendapatan lebih banyak, *ceteris paribus*.Siapa yang berani mempertaruhkan kesehatan dan nyawanya dibidang kerja berbahaya pasti menerima imbalan yang lebih besar.

c. ketidakpastian dan variasi pendapatan

orang yang tekun dalam bidang pekerjaannya akan menuntut lebih dan menerima pendapatan yang lebih besar, jelas tingkat pendapatan mereka tentu saja yang berhasil akan melebihi orang yang bekerja dibidang yang lebih aman.

d. Diskriminasi

tidak di pungkiri bahwa dipasar tenaga kerja sering terjadi diskriminasi suku, ras, agama, atau jenis kelamin dan itu semua merupakan penyebab variasi tingkat pendapatan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan pengaruh pemberian kredit terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah oleh para peneliti sebelumnya, sehingga beberapa poin penting dari hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut

1. Eko Putro Mulyarto (2009), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Rakyat Indonesia Unit Leuwiliang Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilaksanakan untuk tujuan menganalisis karakteristik nasabah KUR di BRI Unit Leuwiliang serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi KUR di BRI Unit Leuwiliang. Metode pengambilan sampel menggunakan metode sample random sampling (pengambilan sampel secara acak) dengan jumlah responden sebanyak 80 orang. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil regresi linear berganda diketahui bahwa hasil uji-F menyatakan bahwa dari keseluruhan peubah bebas mempengaruhi secara nyata perealisasi KUR di BRI Unit Leuwiliang, dengan nilai P-value sebesar 0,006 lebih kecil dibandingkan nilai $\alpha = 0,05$. Dari hasil uji-t diketahui bahwa variabelvariabel yang berpengaruh nyata terhadap

perealisasi KUR pada $\alpha = 0,05$ ada tiga faktor yang mempengaruhi perealisasi KUR, yaitu tingkat pendapatan per bulan, frekuensi pengambilan kredit, dan lama usaha. Sedangkan pada $\alpha = 0,1$ faktor yang mempengaruhi realisasi kredit yaitu modal usaha. Koefisien determinasi yang dihasilkan dari penelitian ini sebesar 58,4 persen, yang artinya kemampuan seluruh variabel X mampu menjelaskan secara nyata keragaman perealisasi KUR sebesar 58,4 persen.

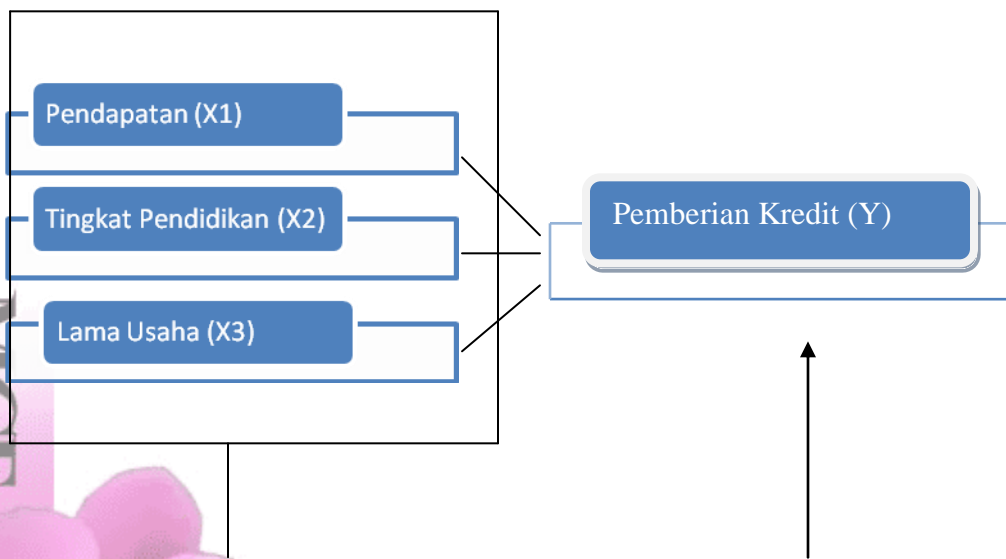
2. Penelitian dilakukan oleh Messah dan Wangaiu (2011) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemberian kredit pada usaha kecil di Meru Central District, Kenya. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan variabel dependen merupakan variabel *dummy* sehingga persamaannya berupa model logit. Dilihat dari tingkat signifikannya variabel umur, gender, pendidikan, pendapatan, dan tingkat bunga mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keputusan pemberian kredit, sedangkan jumlah tanggungan dan atribut bisnis tidak signifikan. Variabel umur, jenis kelamin, pendapatan, lokasi sektor usaha dan jumlah tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif terhadap keputusan memberi kredit, sedangkan jumlah tanggungan, lama usaha, dan tingkat bunga berpengaruh negatif.
3. Penelitian dilakukan oleh Normansyah (2015) meneliti tentang pengaruh pemberian kredit dan modal awal terhadap pendapatan “berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit dan modal terhadap pendapatan ukm berpengaruh positif dan signifikan. Variabel pemberian kredit akan mempengaruhi modal awal secara positif dan signifikan, variabel modal awal dapat mempengaruhi pendapatan usaha mikro dan kecil secara signifikan.
4. Penelitian dilakukan oleh Romauli Nainggolan (2016) tentang “ Gender, Tingkat Pendidikan, Lama Usaha sebagai Determinan

Penghasilan UMKM Kota Surabaya” berdasarkan dari penelitian ini dapat di ambil kesimpulan bahwa laki-laki lebih produktif dalam meningkatkan penghasilan keluarga, namun baik laki-laki maupun perempuan dapat berproduksi dalam membuka usaha yang dimulai dari usaha mikro. Dengan ketekunan dan kerja keras akan meningkatkan penghasilan setiap orang sekalipun tidak memiliki jenjang pendidikan pendidikan yang tinggi, Karena tingkat pendidikan bukan faktor utama meningkatnya penghasilan seseorang.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir teoritis menunjukkan tentang pola pikir teoritis terhadap pemecahan masalah penelitian yang ditemukan. Kerangka pemikiran teoritis didasarkan teori-teori yang relevan, diambil sebagai dasar pemecahan masalah penelitian. Penelitian ini akan mencoba menganalisis pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Lama Usaha, terhadap Pemberian Kredit UMKM. Untuk itu dibuat kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah kebenaran yang ditentukan oleh peneliti, tetapi masih harus dibuktikan atau dites atau diuji kebenarannya (Arikunto,2002). Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah. Hipotesis yang baik memiliki karakteristik, antara lain dapat diteliti, menunjukkan hubungan antar variabel, dapat diuji dan mengikuti temuan - temuan penelitian terdahulu. Berdasarkan variabel yang diambil dalam kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁: Diduga pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberian kredit UMKM

H₂ : Diduga tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberian kreditUMKM

H₃ : Diduga lama usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberian kreditUMKM

H₄ : Diduga Pendapatan, tingkat pendidikan, lama usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian kredit.